

2024

# MANUAL IKU

DIREKTORAT LOGISTIK

DITJEN PDSPKP



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP Menyusun pedoman dalam penghitungan capaian indikator kinerja yang dikenal dengan sebutan Manual IKU.

Manual IKU berisikan penjabaran dari tiap-tiap IKU berupa : Deskripsi IKU, Formula penghitungan IKU, tingkat validitas IKU, Unit/pihak penanggung jawab IKU, sumber data penghitungan IKU, status data penghitungan IKU, jenis penghitungan data IKU, metode cascading, polarisasi, dan jadwal pelaporan.

Sebagai landasan dalam penyajian capaian indikator kinerja utama Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP tahun 2024, kiranya dokumen Manual IKU ini dapat dijadikan acuan dalam penghitungan angka capaian.

Kami berharap agar dokumen Manual IKU Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP tahun 2024 ini dapat digunakan secara bijak oleh seluruh *stakeholder*.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Logistik



**Berny A. Subki**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Manual IKU berisi uraian penjelasan tugas kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja. Manual IKU merupakan informasi tentang suatu IKU secara lengkap yang disusun berdasarkan format yang telah terstandar untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Manual IKU disusun untuk mengukur kinerja dan capaian suatu target kinerja yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut: (1) Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terlaksananya penerapan Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) ; (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ; (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP; dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik

Sasaran strategis di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
IKK1. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor).....	1
IKK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit) .....	2
IKK3. Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data) .....	4
IKK4. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) .....	5
IKK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan) .....	6
IKK6. Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) .....	9
IKK7. Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit).....	10
IKK8. Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit).....	12
IKK9. Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) .....	13
IKK10. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga) .....	14
IKK11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga) .....	15
IKK12. Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit) .....	17
IKK13. Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit).....	18
IKK14. Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang).....	19
IKK15. Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)... ..	20
IKK16. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai) .....	21
IKK17. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai) .....	25
IKK18. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Logistik (%).....	26
IKK19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%).....	27

IKK20. Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%).....	28
IKK21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%) .....	30
IKK22. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%) .....	32

## Sasaran Kegiatan : Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

1. Nama Indikator	:	<b>Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola</b>
2. Definisi	:	<p>Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (<i>procurement</i>), penyimpanan (<i>storage</i>), transportasi (<i>transportation</i>), dan pelayanan (<i>delivery services</i>) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (<i>point of origin</i>) sampai dengan titik tujuan (<i>point of destination</i>) secara efektif dan efisien</p> <p>Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (<i>material management</i>) dan (b) distribusi.</p> <p>Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (<i>point of origin</i>) ke titik tujuan (<i>point of destination</i>) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan</p> <p>Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor</p>
3. Formula Perhitungan	:	$x = \sum a$ <p>x : Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola</p> <p>a : Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola</p> <p>Data dukung berupa dokumen laporan kegiatan lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik.</p>

4. Satuan	:	Koridor
5. Tingkat Validitas IK	:	<b>(X) Outcame</b> ( ) Output Kendali Rendah ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK2.  
IKK2.

Sasaran Kegiatan : Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)

1. Nama Indikator	:	<b>Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)</b>
2. Definisi	:	<p>Jumlah Sistem Ketertelusuran dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p> <p>Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen.</p> <p>Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.</p> <p>Kompleksitas pekerjaan yang meliputi sosialisai STELINA, pendampingan STELINA dan implementasi STELINA oleh pelaku usaha.</p>



		dengan demikian dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah daerah, partisipasi pelaku usaha baik itu nelayan, pembudidaya (pemasok) dan UPI dalam melakukan pendataan usaha perikanan. Selain itu adanya penerbitan perijinan usaha jasa pasca panen, sosialisasi layanan ijin usaha pasca panen dan evaluasi perijinan jasa pasca panen
<b>3. Formula Perhitungan</b>	:	$x = \sum a$ x : Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan a : Jumlah Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan
<b>4. Satuan</b>	:	Unit
<b>5. Tingkat Validitas IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Outcame <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Rendah</b> <input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi
<b>6. Sumber Data</b>	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
<b>7. Pola Perhitungan</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>8. Metode Cascading</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>9. Polarisasi</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. Periode Pelaporan</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>



Sasaran Kegiatan : Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP

1. Nama Indikator	:	<b>Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)</b>
2. Definisi	:	Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, pemetaan, dan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan  Kompleksitas pekerjaan yang meliputi penghitungan indeks kinerja logistik ikan, pemetaan, dan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemerintah daerah, BPS, tenaga ahli, DJPB, DJPT, Pusdatin, BUMN Perikanan, Bank Indonesia, pelaku usaha baik skala besar maupun kecil.
3. Formula Perhitungan	:	$X = a + b + c + d$ X : Data dan Informasi Logistik Hasil Kelautan Perikanan a : Pemetaan Logistik Hasil KP b : Penyusunan Rencana Pasokan dan Kebutuhan Ikan; c : Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan; d : Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Ikan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional
4. Satuan	:	Data
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcome <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

Sasaran Kegiatan : Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok

1. Nama Indikator	: <b>Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)</b>
2. Definisi	: Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional perlu dilakukan pengembangan kelembagaan distribusi ikan meliputi : pembentukan kelompok kerja SLIN maupun penguatan peran Pelaku Usaha.  Kelompok Kerja SLIN terdiri dari Pusat (KKP) dan Daerah yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan melibatkan pelaku usaha.  Kelompok Kerja daerah/Lembaga pengelola daerah yang difasilitasi sebanyak 7 lembaga yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.  Kompleksitas pekerjaan yang meliputi penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola logistik, FGD pokja SLIN Pusat dan daerah dan penyusunan analisis regulasi kelembagaan system logistik ikan nasional (SLIN) yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi atau kebijakan lintas kementerian atau pemerintah daerah, ketersediaan sistem informasi di daerah, penyediaan data dari pelaku usaha.
3. Formula Perhitungan	: <b><math>X = \Sigma a</math></b>  X : Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok  $\Sigma a$ : Jumlah Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok

4. Satuan	:	Lembaga
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcome <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran ( ) Tahunan

SK5.  
IKK5.

Sasaran Kegiatan : Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas

1. Nama Indikator	:	<b>Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)</b>
2. Definisi	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen dalam menjaga stabilitasi ketersediaan komoditas perikanan dalam rangka menjaga pemenuhan kebutuhan hasil perikanan dalam negeri. Untuk itu KKP terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis melalui pengelolaan aspek ketersediaan (supply) melalui optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan serta penguatan aspek permintaan untuk pangsa pasar dalam negeri maupun ekspor. Dalam hal ketersediaan komoditas perikanan dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan, dapat dilakukan upaya

penyediaan melalui pemasukan hasil perikanan secara terkendali dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor hulu-hilir perikanan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 14, 36 dan 39 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Sebagaimana amanat Pasal 276 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021, kebijakan pengendalian pemasukan hasil perikanan dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas perikanan. Neraca Komoditas Perikanan merupakan data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk acuan teknis, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP menyusun Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas untuk mendukung terpenuhinya indikator kinerja.

Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas terdiri dari :

1. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pelumatan tahun 2025
2. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku umpan tahun 2025
3. Analisis ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan untuk Horekapasmod dan pereduksian/bahan pengayaan makanan tahun 2025
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pemindangan tahun 2025
5. Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas tahun 2025

Kompleksitas pekerjaan meliputi penyusunan rekomendasi kebijakan Kebijakan pemasukan komoditas perikanan, verifikasi rencana kebutuhan komoditas perikanan, pemantauan pemasukan komoditas perikanan, dan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. Dengan demikian dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Kemenko Bidang

		Perekonomian, LNSW – Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKIPM, Pusdatin KKP, Direktorat Jenderal PSDKP dan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, Asosiasi Pengusaha, Tenaga Ahli, BRSDMKP, Ditjen Perikanan Budidaya, pemerintah daerah dan pelaku usaha.
3. <b>Formula Perhitungan</b>	:	<b><math>X = \Sigma a</math></b>  X : Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas  $\Sigma a$ : Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas
4. <b>Satuan</b>	:	Rekomendasi Kebijakan
5. <b>Tingkat Validitas IK</b>	:	( ) Outcome <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Output Kendali Tinggi
6. <b>Sumber Data</b>	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. <b>Pola Perhitungan</b>	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. <b>Metode Cascading</b>	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. <b>Polarisasi</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. <b>Periode Pelaporan</b>	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Sasaran Kegiatan : Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP

1. Nama Indikator	:	<b>Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)</b>
2. Definisi	:	<p>Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan</p> <p>Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan). Kompleksitas pekerjaan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan dari bantuan pemerintah yang telah diberikan ,FGD Fasilitasi Kemitraan pengadaan dan penyimpanan dan penataan distribusi, fasilitasi kerjasama pelaku usaha, penguatan penyediaan pelaku jasa logistik, fasilitasi kerjasama operator dengan penyesia jasa logistik. Dengan demikian dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah daerah, parstisipasi pelaku usaha, BUMN perikanan, penyedia jasa logistik, Kementerian Perhubungan, supllier ikan, UPI, asosiasi, dan Kementerian Koperasi. Dengan demikian banyak dipengaruhi oleh faktor internal.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p><b><math>X = \Sigma a</math></b></p> <p>X :</p>

		<p>Dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan/atau distribusi hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan</p>
4. Satuan	:	Kesepakatan
5. Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Outcame <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

SK7.  
IKK7.

Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana penyimpanan produk KP

1. Nama Indikator	:	<b>Sarana Penyimpanan Produk KP yang disediakan</b>
2. Definisi	:	Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana



		<p>dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF.</p> <p>Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Kementerian Koperasi, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).</p>
<b>3. Formula Perhitungan</b>	:	<p><b><math>X = \Sigma a</math></b></p> <p>X : Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah gudang beku portable yang diadakan</p>
<b>4. Satuan</b>	:	Unit
<b>5. Tingkat Validitas IK</b>	:	<p>( ) Outcame  <b>(X) Output Kendali Rendah</b>  ( ) Output Kendali Tinggi</p>
<b>6. Sumber Data</b>	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
<b>7. Pola Perhitungan</b>	:	<p>( ) Akumulasi  ( ) Rata-rata  <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b></p>
<b>8. Metode Cascading</b>	:	<p>( ) Adopsi Langsung  ( ) Lingkup Dipersempit  ( ) Komponen Pembentuk  <b>(X) Buat Baru</b></p>
<b>9. Polarisasi</b>	:	<p><b>(X) Maximize</b>  ( ) Minimize  ( ) Stabilize</p>
<b>10. Periode Pelaporan</b>	:	<p>( ) Bulanan  ( ) Triwulanan  ( ) Semesteran  <b>(X) Tahunan</b></p>

Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP

1. Nama Indikator	:	<b>Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)</b>
2. Definisi	:	<p>Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian.</p> <p>Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Anggota DPR, LPSE, Penyedia Ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Koperasi dan Pelaku Usaha</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p><b><math>X = \Sigma a</math></b></p> <p>X : Pengadaan sarana distribusi yang disediakan</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah mobil refrigerasi yang disediakan</p>
4. Satuan	:	Unit
5. Tingkat Validitas IK	:	<p>( ) Outcame  <b>(X) Output Kendali Rendah</b>          ( ) Output Kendali Tinggi</p>
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	<p>( ) Akumulasi          ( ) Rata-rata  <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b></p>
8. Metode Cascading	:	<p>( ) Adopsi Langsung          ( ) Lingkup Dipersempit          ( ) Komponen Pembentuk  <b>(X) Buat Baru</b></p>

9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK9.  
IKK9.

Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha

1. Nama Indikator	:	<b>Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)</b>
2. Definisi	:	<p>Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian.</p> <p>Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Anggota DPR, LPSE, Penyedia Ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Koperasi dan Pelaku Usaha</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p><b><math>X = \Sigma a</math></b></p> <p>X : Pengadaan sarana distribusi yang disediakan</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah mobil refrigerasi yang disediakan</p>
4. Satuan	:	Unit

5. <b>Tingkat Validitas IK</b>	:	( ) Outcame <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Output Kendali Tinggi
6. <b>Sumber Data</b>	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. <b>Pola Perhitungan</b>	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. <b>Metode Cascading</b>	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. <b>Polarisasi</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. <b>Periode Pelaporan</b>	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK10.  
IKK10.

Sasaran Kegiatan : Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas  
Penerapan Sistem Resi Gudang

1. <b>Nama Indikator</b>	:	<b>Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)</b>
2. <b>Definisi</b>	:	Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang.  Kompleksitas pekerjaan yang meliputi sosialisasi resi gudang, pendampingan pembentukan kelembagaan resi gudang yang banyak di pengaruhi faktor eksternal seperti Bappepti, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, lembaga penilai gudang yang ditentukan dan lembaga keuangan (BANK).
3. <b>Formula Perhitungan</b>	:	<b><math>X = \Sigma a</math></b>  X : Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

		Σa : Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang
4. Satuan	:	Lembaga
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran ( ) Tahunan

SK11.  
IKK11.

Sasaran Kegiatan : Terasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan

1. Nama Indikator	:	<b>Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)</b>
2. Definisi	:	Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan.  Kegiatan ini untuk menunjang pasokan, ketersediaan, keterjangkauan dan kestabilan harga ikan serta meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan melalui sistem rantai dingin. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi FGD Fasilitasi Pengelolaan Transportasi Hasil

		Perikanan dan Koordinasi Pengelolaan Kapal Angkut Perikanan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti dukungan pemerintah daerah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Perhubungan, Pusat Riset Perikanan dan Balai Sosek Perikanan, praktisi dan pelaku usaha.
3. Formula Perhitungan	:	<p><b>X = <math>\Sigma a</math></b></p> <p>X : Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan</p>
4. Satuan	:	Lembaga
5. Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Outcame <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Rendah</b> <input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> <input type="checkbox"/> Tahunan

Sasaran Kegiatan : Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

1. Nama Indikator	:	<b>Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)</b>
2. Definisi	:	<p>Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam rangka peningkatan operasional gudang beku 1000 ton.</p> <p>Dalam rangka melengkapi prasarana pendukung operasional untuk meningkatkan capaian PNBPDitjen PDSPKP diperlukan prasarana pendukung operasional dengan kompleksitas pekerjaan yang meliputi penyusunan dokumen rencana Pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, pencatatan BMN dan penggunaan.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p><b><math>X = \Sigma a</math></b></p> <p>X : Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton</p>
4. Satuan	:	Unit
5. Tingkat Validitas IK	:	<p>( ) Outcome ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b></p>
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	<p>( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b></p>
8. Metode Cascading	:	<p>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b></p>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b>



		( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK13.  
IKK13.

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

1. Nama Indikator	:	<b>Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)</b>
2. Definisi	:	Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.  Dalam rangka melengkapi sarana pendukung operasional diperlukan pengadaan sarana ini dengan kompleksitas pekerjaan yang meliputi penyusunan dokumen rencana tender, pelaksanaan tender, pelaksanaan pengadaan, pencatatan BMN dan penggunaan. Sehingga dapat meningkatkan capaian PNPB Ditjen PDSPKP.
3. Formula Perhitungan	:	<b><math>X = \Sigma a</math></b>  X : Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku  $\Sigma a$ : Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku
4. Satuan	:	Unit
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>

9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK14.  
IKK14.

Sasaran Kegiatan : Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

1. Nama Indikator	:	<b>Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)</b>
2. Definisi	:	Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik.
3. Formula Perhitungan	:	<b><math>X = \Sigma a</math></b>  X : Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP di Lingkungan Direktorat Logistik  $\Sigma a$ : Jumlah Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP di Lingkungan Direktorat Logistik
4. Satuan	:	Orang
5. Tingkat Validitas IK	:	<b>(X) Outcame</b> ( ) Output Kendali Rendah ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>

9. <b>Polarisasi</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. <b>Periode Pelaporan</b>	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran ( ) Tahunan

SK15.  
IKK15.

Sasaran Kegiatan : Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP

1. <b>Nama Indikator</b>	:	<b>Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)</b>
2. <b>Definisi</b>	:	<p>Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SubSektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.</p> <p>Objek/Ruang Lingkup PNBP : pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya</p> <p>Dasar hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP</li> <li>b) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP</li> <li>c) PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
3. <b>Formula Perhitungan</b>	:	<p><b><math>X = \sum a</math></b></p> <p>X :</p> <p>Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik</p>

		Σa : Jumlah PNPB Direktorat logistik
4. Satuan	:	Miliar
5. Tingkat Validitas IK	:	<b>(X) Outcame</b> ( ) Output Kendali Rendah ( ) Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK16.  
IKK16.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik</b>
2. Definisi	:	<p>a) Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.</p> <p>b) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).</p> <p>c) Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p>
3. Formula Perhitungan	:	<i>IPLev 2=Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2</i>

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin.

Pengukuran terbagi menjadi 4 komponen yaitu:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi :

Kode	Nama Pendidikan	Nilai
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi**	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi JFT	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut seminar	0	0	0

Total mengikuti kompetensi	40	40	40
----------------------------	----	----	----

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 .sd ke bawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
  - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
  - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
  - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

	<p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);  c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan  d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p> <p>Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:</p> <p><i>IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin</i></p> <p><i>IPLev 2=Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2</i></p> <p><i>IPLev 1=IPASN Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPLev 2</i></p> <p>Kategori Penilaian IP ASN antara lain</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 – 100</td> <td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td> </tr> <tr> <td>81 – 90</td> <td>Cenderung profesional/tinggi</td> </tr> <tr> <td>71 – 80</td> <td>Rentan tidak profesional/sedang</td> </tr> <tr> <td>61 – 70</td> <td>Cenderung tidak profesional/</td> </tr> <tr> <td>≤60</td> <td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah
Nilai	Kategori												
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi												
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi												
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang												
61 – 70	Cenderung tidak profesional/												
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah												
4. Satuan	: Indeks												
5. Tingkat Validitas IK	: ( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>												
6. Sumber Data	: Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP												
7. Pola Perhitungan	: ( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>												
8. Metode Cascading	: ( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru												
9. Polarisasi	: <b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize												
10. Periode Pelaporan	: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan <b>(X) Semesteran</b> ( ) Tahunan												



Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik</b>																								
2. Definisi	:	<p>Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.</p>																								
3. Formula Perhitungan	:	<p>X : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik</p> <p><math>\Sigma a</math> : Jumlah Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai PM SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Unit Eselon I.</li> <li>• Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="740 1509 1394 1951"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Setditjen PDSPKP
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK16.  
IKK18.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Logistik (%)</b>
2. Definisi	:	Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.
3. Formula Perhitungan	:	<b><math>X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100</math></b>  X : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Logistik (%)  $\Sigma a$ : Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat Logistik Tahun 2023  $\Sigma b$ :

		Jumlah temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK16.  
IKK19.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik</b>
2. Definisi	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Direktorat Logistik
3. Formula Perhitungan	:	<b><math>X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100</math></b>  X : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik

		$\Sigma a$ : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti  $\Sigma b$ : Jumlah rekomendasi yang diberikan
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7. Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lingkup Dipersempit</b> <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
9. Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

SK16.  
IKK20.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar</b>
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li> <li>Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen</li> </ul>

	<p>Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi <i>Collaboration Office</i>.</p>
<p><b>3. Formula Perhitungan</b></p>	<p>:</p> <p>Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulanan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</p> <p>Pembobotan yang dimaksud antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 4W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan poin 0.5</li> <li>• Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.</li> <li>• Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.</li> </ul> <p>Cara Mengukur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (<i>Collaboration Office</i>)</li> <li>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan</li> <li>• Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat eselon 2</li> <li>• Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan</li> </ul> </li> </ol> <p>Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja Eselon I</p> <p>Capaian dihitung dengan rumus :</p> <p><b>(Jumlah Nilai Pencapaian Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung : Jumlah Target Pegawai yang Wajib Ikut Serta/Bergabung) x 100%</b></p>

		Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian KKP pada triwulan I s.d IV
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Pusdatin
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi <b>(X) Rata-rata</b> ( ) Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran ( ) Tahunan

SK16.  
IKK21.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik</b>
2. Definisi	:	Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d)

	<p>merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.</p> <p>Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.</p>
<p><b>3. Formula Perhitungan</b></p>	<p>:</p> <p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun Pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun sebelumnya (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencapaian tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target.</li> <li>2) Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah.</li> <li>3) Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan</li> </ol> <p><i>Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT</i></p> <p>Keterangan :</p> <p>Efektivitas = Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis  PT = Pencapaian Tujuan  IG = Integrasi  AT = Adaptasi</p> <p>Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Itjen KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).</p>

4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

SK16.  
IKK22.

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

1. Nama Indikator	:	<b>Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik</b>
2. Definisi	:	Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran.
3. Formula Perhitungan	:	$x = \frac{\sum a}{b} \times 100\%$ a : nilai anggaran yang direalisasikan (Rp) b : nilai pagu anggaran (Rp) X : Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Logistik (%)
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas IK	:	( ) Outcame ( ) Output Kendali Rendah <b>(X) Output Kendali Tinggi</b>
6. Sumber Data	:	Aplikasi Sakti dan Direktorat Logistik



7. Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8. Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung <b>(X) Lingkup Dipersempit</b> ( ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru
9. Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize ( ) Stabilize
10. Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>